

**PERTANAHAN DAN DINAMIKA KEKUASAAN MAFIA
PERTANAHAN DI INDONESIA**

Vicky andriyono¹, Dimas oktavian indrata², Bhim prakoso³

vickyandriano22@gmail.com¹, oktaviandimas059@gmail.com², bhim_clariss@yahoo.com³

Universitas Jember

Abstrak: Mafia pertanahan telah lama menjadi isu yang meresahkan di Indonesia, mempengaruhi stabilitas hukum dan sosial, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Artikel ini meneliti akar, dinamika, dan dampak dari fenomena ini. asal mula munculnya mafia pertanahan, yang sering kali terkait dengan ketidakjelasan hukum, korupsi, dan intervensi politik. Kelemahan dalam penegakan hukum dan regulasi yang longgar memperkuat keberadaan mafia pertanahan, memungkinkan mereka untuk mengendalikan dan mengeksploitasi pasar tanah secara ilegal. dampak dari keberadaan mafia pertanahan merusak, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masyarakat umum sering menjadi korban dari praktik ilegal mereka, seperti pemaksaan lahan dan penggusuran paksa. Selain itu, pencemaran lingkungan dan degradasi lahan sering kali terjadi sebagai akibat dari aktivitas ilegal mereka. Dengan menyoroti masalah ini, artikel ini menggarisbawahi perlunya tindakan keras dari pemerintah, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas dan reformasi regulasi untuk memerangi mafia pertanahan. Peningkatan transparansi dalam kepemilikan tanah, penguatan lembaga penegak hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam upaya membersihkan sektor pertanahan dari praktik ilegal dan korupsi.

Kata Kunci: Mafia Pertanahan, Penegakan Hukum, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Tanah di Indonesia merupakan aset yang sangat melimpah dan berpotensi besar. Dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Keanekaragaman geografis dan iklimnya menciptakan kondisi yang ideal untuk berbagai jenis tanah dan lahan yang subur. Dari hutan hujan tropis hingga lahan pertanian yang subur, serta pegunungan yang tinggi dan pantai yang indah, Indonesia menawarkan kekayaan tanah yang luar biasa.

Salah satu aspek yang membuat tanah di Indonesia sangat melimpah adalah ragam jenis lahan yang dimilikinya. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Hutan-hutan ini tidak hanya memberikan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, tetapi juga menyediakan sumberdaya alam penting seperti kayu, buah-buahan, dan rempah-rempah. Selain itu, lahan pertanian yang subur tersebar di berbagai wilayah, memungkinkan pertumbuhan berbagai tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya.

Selain keanekaragaman geografisnya, Indonesia juga dianugerahi dengan curah hujan yang relatif tinggi, terutama di wilayah-wilayah tropisnya. Hujan yang cukup melimpah memberikan sumber air yang berlimpah untuk irigasi dan pemenuhan kebutuhan pertanian, serta memelihara kelembaban tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki garis pantai yang panjang, memberikan akses ke sumber daya laut yang berlimpah seperti ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya.

Selain potensi sumber daya alamnya, tanah di Indonesia juga memiliki nilai strategis yang penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial negara. Sebagai basis utama untuk sektor pertanian, tanah mendukung penghidupan jutaan petani dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan negara. Selain itu, sektor pariwisata juga sangat bergantung pada keindahan alam dan kekayaan tanah Indonesia, yang menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menikmati keindahan alamnya yang menakjubkan.

Namun, meskipun tanah di Indonesia sangat melimpah, pengelolaannya masih menjadi tantangan besar. Pertama-tama, perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alamnya masih belum optimal. Deforestasi yang terjadi akibat eksploitasi hutan yang berlebihan dan konversi lahan menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Selain itu, praktik-praktik ilegal seperti pertambangan liar dan perambahan hutan untuk kepentingan bisnis juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.

Selain itu, masalah kepemilikan dan penggunaan tanah juga sering kali menjadi sumber konflik sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan agraria, kebijakan redistribusi tanah, dan klaim atas hak tanah seringkali menjadi sumber konflik antara masyarakat adat, petani, perusahaan, dan pemerintah. Ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum juga turut memperumit masalah ini.

Meskipun tanah di Indonesia sangat melimpah, tantangan dalam pengelolaannya masih besar. Untuk memanfaatkan potensi tanah yang melimpah ini secara berkelanjutan, dibutuhkan upaya yang serius dalam perlindungan lingkungan, penegakan hukum yang kuat, serta pembangunan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis dengan tujuan melihat hukum agraria dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, melampaui pendekatan doktrinal tradisional. Fenomena mafia pertanahan, yang telah lama menjadi masalah di Indonesia, diteliti dari akar, dinamika, dan dampaknya. Akar masalah seringkali terkait dengan ketidakjelasan hukum, korupsi, dan intervensi politik, sementara kelemahan penegakan hukum dan regulasi yang longgar memperkuat eksistensi mafia pertanahan. Dampaknya mencakup kerusakan ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana masyarakat sering menjadi korban praktik ilegal seperti pemaksaan lahan dan penggusuran paksa. Artikel ini menekankan perlunya tindakan tegas pemerintah, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat dan reformasi regulasi, serta peningkatan transparansi kepemilikan tanah dan penguatan lembaga penegak hukum. Keterlibatan aktif masyarakat sipil juga dianggap penting dalam upaya memerangi praktik ilegal dan korupsi di sektor pertanahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketidakpastian legal dalam proses pembuatan akta pertanahan berkontribusi terhadap eskalasi kasus penipuan dan manipulasi tanah di Indonesia

Proses pembuatan akta pertanahan di Indonesia melibatkan peran sentral notaris, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penting dalam memastikan keabsahan transaksi tanah. Sebagai awal proses, notaris bertugas untuk memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk surat-surat kepemilikan tanah dan persyaratan hukum lainnya, untuk memastikan keabsahan dan kejelasan status kepemilikan tanah. Kemudian, notaris memfasilitasi proses transaksi dengan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun akta jual beli atau akta pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selama proses ini, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah memahami dan menyetujui kondisi transaksi, serta memastikan bahwa dokumen-dokumen yang disusun telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Sebagai pejabat umum yang dilindungi oleh hukum, notaris juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta pertanahan, yang menandakan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dengan sah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran notaris dalam proses pembuatan akta pertanahan tidak hanya sebatas sebagai saksi, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan dan keamanan transaksi tanah, yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Melalui penggunaan keahlian profesionalnya dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum pertanahan, notaris memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepastian hukum dalam pembelian, penjualan, dan pemberian hak atas tanah di Indonesia.

Eskalasi kasus penipuan dan manipulasi tanah menjadi tantangan serius di Indonesia, menciptakan ketidakpastian dan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu stabilitas hukum dalam sektor pertanahan. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari kelemahan dalam regulasi hukum, lemahnya penegakan hukum, hingga tingginya permintaan akan tanah yang berpotensi menguntungkan para pelaku ilegal. Pertama-tama, ketidakpastian hukum menjadi pendorong utama bagi kasus penipuan dan manipulasi tanah, karena kesenjangan dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum memberikan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya. Selain itu, lemahnya sistem penegakan hukum memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi dengan relatif bebas tanpa takut akan konsekuensi hukum. Kurangnya transparansi dalam transaksi tanah juga menjadi faktor yang memperparah situasi, memungkinkan praktik penipuan untuk terjadi tanpa terdeteksi.

Selain itu, permintaan yang tinggi atas tanah, terutama di kawasan perkotaan yang sedang berkembang pesat, menciptakan insentif besar bagi pelaku ilegal untuk terlibat dalam praktik penipuan dan manipulasi demi keuntungan pribadi. Akibatnya, masyarakat menjadi korban atas tindakan kriminal ini, kehilangan hak-hak mereka atas tanah dan seringkali mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, eskalasi kasus penipuan dan manipulasi tanah juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap masalah ini diperlukan melalui penguatan regulasi hukum, peningkatan penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak tanah mereka. Dengan mengambil tindakan yang tepat, diharapkan eskalasi kasus penipuan dan manipulasi tanah dapat ditekan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia.

Ketidakpastian hukum menyebabkan dampak negatif yang signifikan, terutama dalam konteks sistem pertanahan di Indonesia. Dengan kejelasan hukum yang kurang, terutama terkait dengan kepemilikan dan transaksi tanah, terbuka celah yang luas bagi praktik penipuan dan manipulasi tanah. Para pelaku ilegal dapat dengan mudah memanfaatkan kekosongan ini untuk melakukan transaksi tanah yang tidak sah, menipu masyarakat dengan menyalahgunakan dokumen-dokumen palsu atau informasi palsu. Akibatnya, masyarakat seringkali menjadi korban dari praktik-praktik ilegal ini, kehilangan hak-hak mereka atas tanah dan mengalami kerugian finansial yang serius. Selain itu, ketidakpastian hukum juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan dan pemerintah secara keseluruhan. Ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang cukup bagi warga negara menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem hukum pertanahan, menghambat investasi dan pembangunan, serta menciptakan ketidakstabilan sosial yang merugikan. Oleh karena itu, peningkatan kejelasan hukum dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci dalam memperbaiki sistem pertanahan, mengurangi praktik penipuan dan manipulasi tanah, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia.

Perlunya reformasi hukum pertanahan menjadi semakin mendesak dalam menghadapi tantangan kompleks terkait ketidakpastian hukum di Indonesia. Dengan kejelasan yang kurang dalam regulasi dan prosedur pembuatan akta pertanahan, terbuka celah yang luas bagi praktik penipuan dan manipulasi tanah, mengakibatkan ketidakpercayaan dan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu stabilitas sistem pertanahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi hukum pertanahan menjadi langkah yang krusial dalam menyelesaikan masalah ini. Pertama-tama, diperlukan peningkatan kejelasan dalam regulasi yang mengatur kepemilikan tanah, transaksi tanah, dan prosedur pembuatan akta pertanahan. Hal ini akan membantu meminimalkan interpretasi yang ambigu dan mengurangi ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan. Selain itu, prosedur pembuatan akta pertanahan perlu disederhanakan dan diatur dengan lebih rinci, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanah secara sah dan aman. Reformasi hukum pertanahan juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan akta pertanahan, termasuk notaris dan badan pertanahan daerah, guna memastikan bahwa standar-standar yang tinggi dalam penerapan hukum dan etika profesional ditegakkan secara konsisten. Selain itu, reformasi juga harus melibatkan penguatan sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan

sengketa pertanahan dengan cepat, adil, dan efektif. Dengan melakukan reformasi yang komprehensif, diharapkan ketidakpastian hukum dalam sistem pertanahan dapat dikurangi secara signifikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

2. Notaris dapat memperkuat perannya dalam memastikan keabsahan dan keamanan transaksi tanah dalam menghadapi ketidakpastian hukum yang ada

Notaris memiliki peran yang sangat penting sebagai pejabat umum dalam memastikan keabsahan dan keamanan transaksi tanah di Indonesia. Sebagai pejabat yang diakui secara hukum, notaris bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan berbagai dokumen hukum, termasuk akta-akta pertanahan. Peran notaris dalam transaksi tanah dimulai sejak awal proses, dimana notaris bertugas untuk memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat tanah dan surat-surat kepemilikan, untuk memastikan bahwa mereka sah dan lengkap. Selain itu, notaris juga berperan dalam memfasilitasi proses transaksi dengan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun perjanjian jual beli atau pemberian hak atas tanah, serta mengecek bahwa kesepakatan yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah memahami dan menyetujui ketentuan transaksi, serta menjalankan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah transaksi selesai, notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta pertanahan, yang menandakan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dengan sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan pengesahan ini memberikan jaminan hukum atas keabsahan transaksi tanah, serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dari risiko sengketa hukum di masa depan. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang mereka tangani, serta memastikan bahwa proses transaksi berjalan dengan adil dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Melalui peran mereka yang proaktif dan profesional, notaris memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keamanan transaksi tanah, serta memastikan bahwa proses pembelian, penjualan, dan pemberian hak atas tanah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan notaris menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam sektor pertanahan, serta memberikan keyakinan bagi masyarakat akan keamanan hak-hak mereka atas tanah.

Tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta pertanahan mencakup serangkaian tugas yang krusial dalam memastikan keabsahan dan keamanan transaksi tanah. Pertama-tama, notaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam transaksi tanah, seperti sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sah, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga bertugas untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah telah dijelaskan secara lengkap dan dipahami dengan baik oleh semua pihak. Hal ini termasuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi hukum dari transaksi yang akan dilakukan. Notaris juga bertindak sebagai mediator dalam proses negosiasi, membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta pertanahan yang berisi rincian transaksi tanah yang telah disepakati. Pengesahan ini dilakukan secara resmi dan sah menurut hukum, yang menandakan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan pengesahan ini memberikan jaminan

hukum atas keabsahan transaksi tanah, serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dari risiko sengketa hukum di masa depan. Selain tugas-tugas pokok tersebut, notaris juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang mereka tangani, serta memastikan bahwa proses transaksi berjalan dengan adil dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan menjalankan tanggung jawab mereka dengan teliti dan profesional, notaris memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keamanan transaksi tanah, serta memastikan bahwa proses pembelian, penjualan, dan pemberian hak atas tanah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan notaris menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam sektor pertanahan, serta memberikan keyakinan bagi masyarakat akan keamanan hak-hak mereka atas tanah.

Ketidakpastian hukum, khususnya dalam regulasi hukum pertanahan, menjadi hambatan utama bagi peran notaris dalam memastikan keabsahan transaksi tanah di Indonesia. Ketidakjelasan dalam regulasi hukum pertanahan menciptakan lingkungan yang tidak pasti bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, ketika regulasi hukum pertanahan tidak cukup jelas atau terbuka terhadap interpretasi yang beragam, notaris sering kali menghadapi kesulitan dalam menafsirkan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam proses verifikasi dokumen dan pembuatan akta pertanahan, karena notaris harus memastikan bahwa transaksi yang mereka tangani sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat membuat notaris ragu-ragu dalam mengambil keputusan terkait dengan proses transaksi tanah, karena mereka tidak yakin apakah tindakan yang mereka lakukan akan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian hukum dapat memaksa notaris untuk menolak atau menunda proses transaksi tanah, karena mereka tidak dapat memastikan keabsahan atau kelegalan transaksi tersebut. Akibatnya, masyarakat menjadi terhambat dalam mendapatkan akses yang cepat dan mudah terhadap jasa notaris, serta terancam mengalami kerugian finansial dan hukum akibat penundaan atau pembatalan transaksi tanah. Di sisi lain, ketidakpastian hukum juga dapat memperkuat celah bagi praktik penipuan dan manipulasi tanah, karena para pelaku ilegal dapat memanfaatkan kekosongan dalam regulasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan reformasi hukum yang diperlukan guna mengatasi ketidakpastian hukum dalam regulasi hukum pertanahan. Reformasi tersebut harus bertujuan untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam regulasi, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal dalam transaksi tanah. Dengan melakukan reformasi hukum yang tepat, diharapkan ketidakpastian hukum dalam regulasi hukum pertanahan dapat dikurangi, sehingga memungkinkan notaris untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan memastikan keabsahan transaksi tanah secara lebih efisien.

KESIMPULAN

Ketidakpastian hukum dalam proses pembuatan akta pertanahan memiliki dampak yang signifikan terhadap eskalasi kasus penipuan dan manipulasi tanah di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh kelemahan dalam regulasi hukum pertanahan yang menciptakan lingkungan yang tidak pasti bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Ketidakjelasan dalam regulasi memunculkan kesulitan dalam menafsirkan aturan yang berlaku, sehingga notaris sering menghadapi dilema dalam memastikan keabsahan transaksi. Selain itu, ketidakpastian hukum juga memperkuat celah bagi praktik penipuan dan manipulasi tanah,

karena para pelaku ilegal memanfaatkan kekosongan dalam regulasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa terdeteksi. Dampak negatif dari ketidakpastian hukum termasuk terhambatnya akses masyarakat terhadap jasa notaris, kerugian finansial dan hukum akibat penundaan atau pembatalan transaksi tanah, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Oleh karena itu, perlunya reformasi hukum pertanahan menjadi krusial untuk mengatasi ketidakpastian hukum, meningkatkan kejelasan dalam regulasi, memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal, dan memastikan notaris dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dalam memastikan keabsahan transaksi tanah. Dengan melakukan reformasi yang tepat, diharapkan eskalasi kasus penipuan dan manipulasi tanah dapat ditekan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, dan memulihkan kepercayaan terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia.

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam proses pembuatan akta pertanahan dan mengurangi kasus penipuan serta manipulasi tanah, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyempurnaan regulasi hukum pertanahan untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi, peningkatan pengawasan terhadap praktik ilegal, serta penguatan kapasitas dan etika profesional notaris. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih lanjut dalam reformasi hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam transaksi tanah. Dengan adopsi langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan integritas dan keamanan dalam sistem pertanahan, memberikan kepastian hukum yang lebih baik, dan membangun kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat terhadap sistem pertanahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, J. J., & Handoko, W. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, 13(1), 181-192.
- Damayanti, V., Zuhir, M. A., & Mansyur, A. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Cover Note Sebagai Jaminan Hutang Atas Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran Di Kantor Pertanahan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 11-22.
- Kristanto, Y., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 197-202.
- Kurnia, R. A., & Maâ, U. (2018). Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal). *Jurnal Akta*, 5(1), 295-308.
- Laksana, I. P. G. A., & Griadhi, N. M. A. Y. G. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Membuat Akta dalam Bidang Pertanahan. *Kertha Negara*7, (11), 1-18.
- Pasaribu, A. (2018). Keabsahan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Ditentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2(1), 79-92.
- Ramadhan, D. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan. *Notarius*, 12(2), 679-690.
- Tantri, W. K. (2020). Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai PPAT. *Indonesian Notary*, 2(4), 31.